

Efektivitas Pengelolaan Sentra Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Perikanan Kabupaten Sinjai

Mila Mey Murdiana, Fitrawati, Hermansyah

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: milameyadn@gmail.com

Abstract. *This study investigates the effectiveness of managing the Small and Medium Industry (IKM) Fisheries Center in Sinjai Regency. The research was motivated by the significant fisheries potential in Sinjai, which has not been optimally utilized due to various structural, technical, and managerial challenges. The study employs a qualitative descriptive method with data collected through field observations, in-depth interviews with key informants, and documentation from relevant sources. The analytical framework is based on George R. Terry's four management functions: planning, organizing, actuating, and controlling. The findings indicate that the management of the IKM Fisheries Center is not yet effective. Planning documents are often not aligned with the actual needs of IKM actors and lack integration with market development strategies. Organizational aspects suffer from weak coordination among agencies, leading to overlapping or unimplemented programs. Implementation is constrained by limited facilities, insufficient technical expertise, and low utilization of digital technology. Control mechanisms, including monitoring and evaluation, are not carried out regularly, resulting in unresolved field problems. Supporting factors include abundant local raw materials and government policy support, whereas inhibiting factors include limited market access, low human resource capacity, and difficulties in securing sustainable raw materials. The study recommends participatory planning, capacity building, digital marketing adoption, and strengthened monitoring mechanisms to enhance management effectiveness in the future.*

Keywords: *effectiveness, management, IKM center, fisheries, Sinjai Regency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Perikanan di Kabupaten Sinjai. Latar belakang penelitian ini berangkat dari potensi perikanan yang besar di Sinjai, namun pemanfaatannya belum optimal akibat berbagai kendala struktural, teknis, maupun manajerial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi dari sumber-sumber resmi. Analisis efektivitas dilakukan berdasarkan empat fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sentra IKM Perikanan Kabupaten Sinjai masih belum efektif. Pada aspek perencanaan, program yang disusun belum sepenuhnya berbasis kebutuhan pelaku IKM dan kurang terintegrasi dengan strategi pengembangan pasar. Dari sisi pengorganisasian, koordinasi antarinstansi terkait masih lemah sehingga terdapat program yang tumpang tindih atau tidak terlaksana. Pelaksanaan program juga menghadapi keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga teknis yang kompeten, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, mekanisme pengawasan belum dilakukan secara rutin, sehingga berbagai permasalahan di lapangan sering tidak segera terselesaikan. Faktor pendukung berupa ketersediaan bahan baku lokal dan adanya kebijakan pemerintah, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan akses pasar, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta sulitnya memastikan ketersediaan bahan baku berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan partisipatif, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, dan penguatan mekanisme pengawasan.

Kata Kunci: efektivitas, pengelolaan, sentra IKM, perikanan, Kabupaten Sinjai

Received Apr 12, 2026; Revised May 02, 2026; Accepted May 20, 2026

* Mila Mey Murdiana: Email: milameyadn@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.504 pulau, dianugerahi kekayaan sumber daya alam perairan yang melimpah, mencakup berbagai jenis kekayaan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Sektor perikanan menjadi salah satu pilar strategis dalam pembangunan nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024). Data terbaru menunjukkan bahwa volume produksi perikanan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 24,85 juta ton per tahun, meningkat 13,63% dari 21,87 juta ton pada tahun sebelumnya. Posisi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik juga menjadikannya jalur perikanan internasional yang penting (WRI Indonesia, 2024).

Lebih dari sekadar kontributor global, sektor perikanan memiliki peran vital dalam menyediakan nutrisi dan sumber pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 2,66% pada tahun 2023, dan pada triwulan III tahun 2024, kontribusinya sebesar 2,25% (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024). Selain itu, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai USD 4,81 miliar atau setara dengan Rp. 77 triliun per Januari-Oktober 2024, sebuah peningkatan sebesar 4,37% dari tahun sebelumnya.

Pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi, yaitu pengolahan bahan mentah secara lokal untuk menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi (Themmy Doaly, 2023). Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) perikanan menjadi instrumen utama dalam strategi ini, berfungsi sebagai pusat pengembangan yang mengintegrasikan penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk perikanan (Nainggolan & Tampubolon, 2019). Sentra IKM memainkan peran strategis dalam meningkatkan PDB nasional, serta kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengolah perikanan (Arifnur, Nurani, & Solihin, 2023).

Komitmen pemerintah untuk memajukan sektor perikanan diperkuat dengan berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39 tahun 2017 tentang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Regulasi ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk mengelola sumber daya perikanan secara optimal (Arifnur, Nurani, & Solihin, 2023). SKPT dirancang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akses masyarakat pesisir terhadap sarana modern, seperti *cold storage* dan tempat pelelangan ikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan memperluas akses pasar (Fajar, 2022).

Kabupaten Sinjai, yang terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi perikanan yang besar (Wibowo, Aiman, & Setyawan, 2021). Dengan garis pantai yang panjang, sektor perikanan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah ini. Dalam rangka mengoptimalkan potensi ini, pemerintah telah membangun Sentra IKM Perikanan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Sentra IKM ini didirikan di Kelurahan Lappa, dekat dengan Pelabuhan Larea-rea, dan dikembangkan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total dana Rp25,7 miliar.

Pendirian Sentra IKM ini bertujuan untuk mempromosikan hilirisasi produk *seafood* olahan, seperti bakso ikan, ikan cincang, dan nugget ikan, serta mendukung munculnya pelaku industri baru (Hartini & Budi, 2020). Industri perikanan skala kecil dan menengah di Kabupaten Sinjai merupakan sektor ekonomi utama yang menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi signifikan pada PDB regional. Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan sentra IKM di Kabupaten Sinjai masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya (Hartono, 2024).

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Banyak pelaku usaha masih bergantung pada metode pengolahan tradisional yang kurang efisien (Nurhayaty & Orshella, 2020). Selain itu, terbatasnya akses terhadap pembiayaan menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah kendala pemasaran. Meskipun produk olahan perikanan memiliki potensi pasar yang luas, banyak pelaku IKM kesulitan memasarkan produk mereka, terutama di luar daerah (Puspita Rini, 2017). Kurangnya pemahaman tentang pemasaran modern, seperti pemanfaatan platform digital dan pemasaran *online*, membuat produk lokal kalah bersaing dengan produk dari daerah lain yang memiliki kemasan, kualitas, dan distribusi yang lebih baik.

Selain itu, kurangnya pembinaan dan pendampingan yang terstruktur dari pemerintah dan lembaga terkait juga menjadi hambatan. Banyak pelaku usaha tidak mendapatkan informasi atau pelatihan yang memadai mengenai cara meningkatkan kualitas produk, mengelola usaha secara profesional, dan mengidentifikasi peluang pasar (Nayan Helmayunita, V. S. dkk, 2023). Pembinaan yang tidak optimal ini membuat sebagian besar pelaku IKM kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka secara terorganisir dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sentra IKM perikanan yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing (Ni Made Muriati, & Wayan Guwe Hadiwijaya, 2021).

Meskipun berbagai program telah diluncurkan, pengelolaan sentra IKM perikanan di Kabupaten Sinjai masih memerlukan perbaikan agar sektor ini dapat berkembang secara optimal. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas "Efektivitas Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sinjai" untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dapat membawa perubahan signifikan bagi sektor perikanan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku IKM dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada efektivitas pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) perikanan di Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian berada di Sentra IKM Perikanan Kabupaten Sinjai, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara. Data penelitian dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dari Dinas Perikanan dan Kelautan serta pelaku usaha IKM, serta observasi langsung di lapangan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, dan literatur yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Perikanan Kabupaten Sinjai terletak di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara. Lokasi ini dipilih karena memiliki akses yang strategis, berdekatan dengan Pelabuhan Larea-rea, yang memfasilitasi distribusi bahan baku dari nelayan dan kemudahan pengiriman produk jadi. Sentra IKM ini merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dengan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari tahun 2017 hingga 2019. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui

proses hilirisasi dan mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah di sektor ini. Fasilitas yang tersedia mencakup area produksi, gudang penyimpanan, dan ruang pameran produk, yang dirancang untuk mendukung kegiatan pengolahan hasil laut.

Efektivitas Pengelolaan Sentra IKM Perikanan di Kabupaten Sinjai

Efektivitas pengelolaan Sentra IKM dianalisis berdasarkan empat dimensi manajemen menurut George R. Terry: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Proses perencanaan pengelolaan Sentra IKM di Kabupaten Sinjai masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar. Dokumen perencanaan yang ada lebih menekankan pada target administratif pemerintah daerah, bukan pada kebutuhan riil pelaku IKM. Hal ini tercermin dari minimnya keterlibatan pelaku usaha dalam proses penyusunan rencana kegiatan, sehingga aspirasi mereka belum terakomodasi secara memadai. Selain itu, perencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi pengembangan pasar. Produk olahan ikan yang dihasilkan masih berorientasi pada skala lokal, tanpa strategi pemasaran yang jelas untuk memperluas akses ke pasar regional maupun nasional. Akibatnya, meskipun terdapat potensi bahan baku melimpah, nilai tambah yang diperoleh pelaku IKM masih rendah. Perencanaan yang bersifat top-down ini juga menimbulkan kesenjangan antara dokumen perencanaan dengan kondisi lapangan. Program yang disusun tidak jarang bersifat tumpang tindih atau bahkan tidak terlaksana karena kurang relevan dengan kapasitas pelaku IKM. Menurut Terry (2006 dalam Sobri dkk., 2009), perencanaan yang baik harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan serta melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung. Namun, prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pengelolaan Sentra IKM di Sinjai.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dari aspek pengorganisasian, kelemahan utama terletak pada koordinasi antarinstansi. Struktur organisasi UPTD Sentra IKM sebenarnya telah dibentuk dan dilengkapi dengan pembagian tugas, namun implementasinya belum berjalan optimal. Tugas dan wewenang yang seharusnya menjadi dasar kerja justru sering menimbulkan tumpang tindih program antar lembaga, sehingga efektivitas pengorganisasian rendah. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan juga memperburuk kondisi ini. Misalnya, kegiatan pendampingan pelaku IKM seringkali dilaksanakan oleh lebih dari satu instansi tanpa koordinasi, mengakibatkan duplikasi kegiatan dan pemborosan sumber daya. Beberapa program bahkan tidak terlaksana karena tidak adanya pembagian tanggung jawab yang jelas. Padahal, prinsip pengorganisasian yang baik menekankan pentingnya kejelasan struktur, pembagian kerja, dan koordinasi (Hasibuan, 2009). Kelemahan dalam aspek ini berimplikasi langsung pada efektivitas pelaksanaan program, karena tanpa koordinasi yang solid antarinstansi, potensi dukungan yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahap pelaksanaan merupakan dimensi yang paling nyata dirasakan oleh pelaku IKM. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan produksi dan pendampingan tidak berlangsung secara konsisten. Banyak kegiatan yang terhenti di tengah jalan akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Misalnya, peralatan pengolahan dan ruang produksi bersama (RPB) yang sudah tersedia tidak digunakan secara optimal karena kurangnya tenaga teknis yang mampu mengoperasikan peralatan tersebut. Selain itu, rendahnya pemanfaatan teknologi modern juga menjadi kendala utama. Sebagian besar pelaku IKM masih menggunakan metode pengolahan

tradisional yang kurang efisien, sehingga kualitas produk olahan sulit bersaing dengan produk serupa dari daerah lain. Rendahnya kualitas produk berdampak pada lemahnya daya saing, baik di pasar lokal maupun regional. Menurut Terry (2006), pelaksanaan seharusnya menjadi tahap yang menggerakkan semua sumber daya agar tujuan organisasi tercapai. Namun, di Sinjai, motivasi pelaku usaha masih terbatas, pendampingan teknis tidak berkesinambungan, dan fasilitas yang ada belum mampu mendukung peningkatan produktivitas. Dengan demikian, dimensi pelaksanaan belum memberikan hasil yang diharapkan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan Sentra IKM Perikanan Kabupaten Sinjai juga belum berjalan efektif. Monitoring dan evaluasi hanya dilakukan secara insidental, tidak rutin, sehingga berbagai permasalahan yang muncul di lapangan tidak segera mendapatkan solusi. Misalnya, kendala terkait keterbatasan bahan baku dan pemasaran seringkali berulang karena tidak ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Pengawasan lebih banyak berfokus pada aspek administratif, seperti pelaporan kegiatan, daripada evaluasi substantif mengenai kualitas produk atau efektivitas pendampingan. Akibatnya, kelemahan yang sudah terjadi dari tahun ke tahun tidak diperbaiki secara sistematis. Menurut Koontz (dalam Hasibuan, 2009), pengawasan merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Tanpa pengawasan yang kuat, seluruh tahapan manajemen lainnya akan kehilangan arah. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa lemahnya fungsi pengawasan berdampak pada berulangnya hambatan di lapangan dan menurunnya efektivitas pengelolaan secara keseluruhan.

Berdasarkan keempat aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Sentra IKM Perikanan Kabupaten Sinjai belum berjalan efektif. Lemahnya fungsi manajemen pada setiap tahapan memperlihatkan perlunya perbaikan sistem pengelolaan secara menyeluruh.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Sentra IKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sentra IKM di Kabupaten Sinjai tidak hanya dipengaruhi oleh fungsi manajemen, tetapi juga oleh adanya faktor pendukung dan penghambat yang secara nyata memengaruhi keberhasilan program.

a. Faktor Pendukung

Faktor utama yang mendukung keberadaan Sentra IKM di Kabupaten Sinjai adalah ketersediaan bahan baku perikanan yang melimpah. Sinjai memiliki potensi besar dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya, sehingga suplai bahan baku relatif mudah diperoleh. Ketersediaan ini menjadi keunggulan komparatif yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Selain itu, terdapat dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta membangun infrastruktur fisik, seperti ruang produksi bersama (RPB) dan fasilitas pengolahan ikan. Kebijakan pengembangan hilirisasi sektor perikanan juga memberikan peluang bagi Sentra IKM untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Dukungan regulasi dan infrastruktur ini, meskipun belum dimanfaatkan secara maksimal, tetap menjadi modal penting yang membedakan Kabupaten Sinjai dengan daerah lain yang memiliki potensi serupa namun minim intervensi kebijakan. Dengan demikian, faktor pendukung ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan IKM apabila diikuti dengan tata kelola yang lebih baik.

b. Faktor Penghambat

Meskipun demikian, masih terdapat hambatan yang memperlemah efektivitas pengelolaan. Hambatan tersebut antara lain: keterbatasan akses pasar, rendahnya kualitas SDM pelaku IKM, kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun, serta kesulitan memperoleh bahan baku secara berkelanjutan. Hambatan-hambatan tersebut berimplikasi pada tidak konsistennya kegiatan produksi dan lemahnya daya saing produk IKM Kabupaten Sinjai.

1. Keterbatasan akses pasar. Produk olahan ikan dari Sinjai masih terkendala dalam penetrasi ke pasar regional maupun nasional. Pemasaran lebih banyak dilakukan secara tradisional dengan jangkauan terbatas, sehingga peluang ekspansi belum maksimal.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar pelaku IKM masih mengandalkan pengalaman tradisional dalam mengolah hasil perikanan. Kemampuan teknis dan manajerial, termasuk keterampilan dalam pemasaran digital, masih sangat terbatas. Hal ini menghambat peningkatan kualitas dan kuantitas produksi.
3. Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur. Fasilitas yang telah dibangun, seperti RPB, peralatan pengolahan, dan sarana pendukung lainnya, belum digunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan minimnya tenaga teknis, lemahnya koordinasi, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan.
4. Kesulitan memperoleh bahan baku secara berkelanjutan. Meskipun ketersediaan bahan baku cukup melimpah, keberlanjutan pasokan seringkali terganggu oleh musim penangkapan ikan, distribusi yang tidak stabil, serta keterbatasan pengolahan pascapanen. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan produksi pelaku IKM.

Hambatan-hambatan tersebut berimplikasi pada rendahnya daya saing produk IKM Kabupaten Sinjai. Produk yang dihasilkan sulit menembus pasar yang lebih luas karena kualitas belum memenuhi standar, jumlah produksi tidak konsisten, serta jaringan distribusi belum terbentuk dengan baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Perikanan di Kabupaten Sinjai belum berjalan efektif. Hal ini tampak dari lemahnya fungsi manajemen menurut George R. Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan program masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan pelaku IKM. Pengorganisasian menunjukkan koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, sehingga terjadi tumpang tindih program. Pelaksanaan kegiatan tidak konsisten akibat keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga teknis, serta rendahnya pemanfaatan teknologi modern. Sementara itu, pengawasan belum dilakukan secara rutin sehingga berbagai hambatan tidak segera teratasi.

Selain itu, penelitian menemukan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Sentra IKM. Faktor pendukung meliputi potensi bahan baku perikanan yang melimpah serta dukungan kebijakan pemerintah. Namun demikian, faktor penghambat masih mendominasi, seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya kualitas SDM pelaku IKM, pemanfaatan infrastruktur yang belum maksimal, serta kesulitan memperoleh bahan baku secara berkelanjutan.

Dengan demikian, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Sentra IKM, antara lain melalui penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, serta penguatan mekanisme pengawasan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat

daya saing produk IKM perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Aji Wibowo, W. (2022). *Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat*. <https://repositoru.unsri.ac.id>.
- Fajar, R. (2022). *Pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Daerah Hasil Pantai Tanjung Balai Asahan*.
- Hartono, T. (2024). *Implementasi kebijakan pengembangan sentra industri kecil teritip di kota balikpapan*.
- Muriati, N. M., & Guwe Hadiwijaya, W. (2021). Analisis Strategi Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan di Desa Kusamba Kabupaten Klungkung: Ditinjau Dari Perspektif Bisnis dan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1-15.
- Nasir, M. (2015). Pengaruh Efektivitas Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar.
- Nayan Helmayunita, S., Vanica Serly, dkk. (2023). Pendamping Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Mewujudkan IKM Pessel Yang Tangguh dan Berdaya Saing. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Rusdianto, D., & Firmansyah, F. (2022). Analisis Pemanfaatan Web Sistem Informasi Desa Di Desa Dukuh Kecamatan Ibun Kab Bandung. *J-Sika| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa*, 4(1), 39-52.
- Satria Lumare, M. P. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Utara Kabupaten Kepulauan Talaud. Vol.5 No. 78. [tautan mencurigakan telah dihapus].
- Terry, G. R. (2006). *Principles of Management*.
- Themmy Doaly. (2023). Semangat Hilirisasi Perikanan Harus diiringi Penguatan di Sektor Hulu. <https://www.mongabay.co.id/2023/02/27/semangat-hilirisasi-perikanan-harus-diiringi-penguatan-di-sektor-hulu/>
- Wibowo, B. A., Aiman, A. M. A., & Setyawan, H. A. (2021). Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kabupaten Sinjai. *Journal of Marine Research*, 10(4), 481–492. <https://doi.org/10.14710/jmr.v10i4.31570>
- WRI Indonesia. (2024). *Pengaruh Letak Geografis Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakatnya*.
- Wulandari, A., & Sumarsono, D. (2022). Efektivitas Pelayanan Perizinan Online Terhadap UMKM Di Kecamatan Kota Mungkid. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), 39-52.
- Yusuf, A. M. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). Data Produksi Perikanan Nasional.
- Permen Kelautan dan Perikanan No. 39 tahun 2017 tentang SKPT.
- S.P., L. (2018). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*.
- Setiawan, H., P, A. A., F, M. A., & Puspita, R. (2021). Analisis Pengelolaan Sentra IKM Berbasis Tahu di Kabupaten Sukabumi.
- Sutrisno. (2018). *Manajemen Kualitas Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- Wibisono, D. (2018). *Manajemen Kinerja Perusahaan: Sebuah Panduan Praktis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, A. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.